

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmadja, Arifin. *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*. Bandung: Mujahid Press, 2014.
- Bahri, Syaiful. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan, dan Teori Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Danil, Elwi. *Korupsi Konsep, Tindakan Pidana dan Pemberantasannya*. Depok: Raja Grafindo, 2011.
- Gunandi, Ismu. Efendi, Junandi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM Press), 1978.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Garfika. 2014.
- Jakarta: Prenadema Group, 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Asnadi Mahasatya, 2002.
- Moeljatno. *Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama, Seksi Kepidanaan*. Yogyakarta:
- Muladi. Nawami, Barda. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 1992.
- Mulyadi. *Auditing*. Semarang: Penerbit Salemba, 2002.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia, 2011.
- Nelson, Febby. *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekamto, Soerjono. Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soematri, Rommy. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sofyan, M. Andi. Asis. Ilyas, Amir. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenademedia, 2014
- Sudarto. *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1987.
- Surachman. Maringka. *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Tuanakotta, Theodorus. 2014. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba, 2014.

Jurnal

Amania, Narnia. *Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum 2, no. 2 (November, 2016).

Bayu Ferdinan, *Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Syiah Kuala 3, no.2 (Desember, 2018).

Chandra A Astuti. "Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi". Diponegoro Jurnal Accounting 4, no. 3, (Oktober, 2015).

Dimas, Kusuma. *Wewenang Hakim Menilai Sendiri Kerugian Keuangan Negara Dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Jurist-Diction 3, no.6 (November, 2020).

Indrawan, Kurniawan. *Survey Pemahaman Masyarakat Pulau Kambing Terkait Korupsi*, Jurnal Pokok Edukasi 1, no.1 (Januari, 2023).

Michael, Barama. *Model Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 8 (Maret, 2016).

Mustaghfirin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Pembaharuan Hukum 2, no.1 (Januari, 2015).

Pradnyana, I. M. F., & Parsa, I. W. *Kewenangan BPK dan BPKP dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 2 no.10 (Juni, 2021).

Tarigan, S. Edy., Ablisar, Madisa., Sunarni., Mulyadi, Mahmud. *Eksistensi Kewenangan Jaksa Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Pembuktian pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Locus of Academic Literature 2, no. 2 (Februari, 2023).

Wahyudianto, Agung. *Kewenangan Kejaksaan dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara dan Perhitungan Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Badamai Law Jurnal 3, no. 2 (September, 2018).

Zainudin, Wirabuana. *Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan Dalam Menyatakan Kerugian Keuangan*, Jurnal Matakao 1, no.1 (Mei 2023).

Undang-Undang

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantas Korupsi*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6408.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4366.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4356.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38.
- Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-X/2012. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 21.
- Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 04 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Peraturan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4.
- Republik Indonesia. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Investigatif, Peraturan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1.
- Republik Indonesia. Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor B-22/1/SUJA/02/2021. Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 22.
- Republik Indonesia. Surat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.88/PID.SUS-TPK/2022/PN JK. Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Nomor 88

